ABSTRACT

E-Procurement is an activity of procurement to have goods and services carried out electronically, where all activities are facilitated by software or the web and linked to the internet. Management needs to be done on the system so that the principles of procurement that are integrated, effective, efficient, transparent, competitive, non-discriminatory, and accountable can be realized. Poor management, results in system failure in providing excellent service to users, material, financial losses, and loss of public trust. Aims of this study is to measure the capability of governance through measurement of the maturity electronic procurement. Measurements were made using the COBIT Maturity Model (CMM) with a top down scheme and combining the principles of procurement as well as 17 Electronic Procurement Services (LPSE) standards. The LPSE standard is a product merger of ISO 27001 about information security and the ISO 20000 about IT Service Management (ITSM). The results obatained 48 indicators as a measurement tools in 15 domains for improving IT governance. The measurement uses primary data obtained from interviews, questionnaires, and field observations of the SPSE operators of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration. Measurement result of the capability level are mostly at the capability level 0, recommendations for improvement refer to the best practice standards suggested by COBIT 5.

Keywords: Information Technology (IT) Governance, COBIT 5, 17 SPSE Standards, Capability Level, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id/

ABSTRAK

E -Procurement adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, dimana seluruh kegiatannya difasilitasi oleh *software* (perangkat lunak) atau *web* dan dihubungkan dengan internet. Pengelolaan perlu dilakukan terhadap sistem agar prinsip pengadaan yakni terintegrasi, efektif, efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel dapat terwujud. Pengelolaan yang tidak baik, berdampak pada kegagalan sistem dalam memberikan layanan yang prima bagi pengguna, kerugian material dan finansial, serta hilangnya kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kapabilitas tata kelola melalui pengukuran kematangan pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengukuran dilakukan menggunakan *COBIT Maturity Model (CMM)* dengan skema *top down* dan menggabungkan prinsip pengadaaan serta 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Standar tersebut merupakan produk hasil penggabungan antara ISO 27001 tentang keamanan informasi dan standar ISO 20000 tentang manajemen layanan teknologi informasi atau *IT Service Management* (ITSM). Hasil yang didapat adalah 48 indikator sebagai alat ukur pada 15 *domain* perbaikan terhadap tata kelola TI. Pengukuran menggunakan data primer yang didapat dari wawancara, kuesioner, serta observasi lapangan terhadap pengelola SPSE Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Hasil pengukuran tingkat kapabilitas sebagian besar berada pada kapabilitas level 0, rekomendasi perbaikan mengacu pada standar *best practise* yang disarankan COBIT 5.

Kata kunci : Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 5, 17 Standar SPSE, Tingkat Kapabilitas, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id/